



KR GROUP  
http://www.krjogja.com

# Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN  
SCAN BARCODE



RABU PON

30 AGUSTUS 2023 ( 12 SAPAR 1957 / TAHUN LXXVIII NO 319)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

## PENCULIKAN DAN PENGANIAYAAN WARGA SIPIL Pomdam Jaya Cari Handphone Tersangka

**JAKARTA (KR)** - Polisi Militer Komando Daerah Militer V/Jayakarta (Pomdam Jaya) memeriksa delapan saksi terkait kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh Praka RM, Praka HS, dan Praka J sehingga mengakibatkan korban, seorang warga sipil meninggal dunia. Pomdam Jaya saat ini juga masih mencari alat-alat bukti terkait kasus tersebut, di antaranya gawai (handphone) milik tersangka.

“Saksi yang kami periksa jumlahnya delapan orang, baik dari pihak keluarga korban yang pada saat kejadian, pertama menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang kemudian berusaha mengambil korban, tetapi sebelumnya warga sekitar toko mencoba memberikan perlawanan. Ada tiga orang yang kami periksa (dari) keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini jadi korban,” kata Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Danpomdam, korban penculikan bukan hanya satu warga sipil, tetapi ada dua. “Yang satu dilepas di sekitar Tol Cikeas. Itu dilepas karena mendapati korban kondisinya sudah agak, napas juga susah,” katanya.

\* Bersambung hal 7 kol 5

## CAK IMIN BAKAL LAPOR PARTAI Koalisi Indonesia Maju Gantikan KKIR

**JAKARTA (KR)** - Bakal calon presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju menggantikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Penggantian nama tersebut telah dirembuk bersama ketua-ketua partai anggota koalisi, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Tadi kami berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul (Zulkifli Hasan), Pak Airlangga, Gus Muhaimin Iskandar, dan Pak Profesor (Yusril Ihza Mahendra), kami sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju,” kata Prabowo dalam rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8) malam.

Nama koalisi itu terpilih karena Prabowo, bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan PBB, berkeinginan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. “Setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintahan ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia, dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang, dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau,” kata Prabowo.

\* Bersambung hal 7 kol 5

## BAWASLU INGATKAN KEPALA DAERAH Tidak Kampanyekan Bakal Capres

**JAKARTA (KR)** - Kepala Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Rahmat Bagja mengimbau kepala daerah agar tidak mengkampanyekan bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024, sebelum waktu kampanye dimulai.

“Kami imbau teman-teman kepala daerah untuk tidak melakukan hal tersebut, ya berhati-hati,” kata Bagja di sela-sela kegiatan webinar peningkatan kompetensi Polwan dalam rangka HUT ke-75 Polwan bertajuk Polri Presisi untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju di Tribbrata, Jakarta Selatan, Selasa (29/8).

Bagja menyebut saat ini tahapan Pemilu 2024 masih dalam sosialisasi dan hanya diperbolehkan memperkenalkan bakal capres bukan mengajak atau mengkampanyekan bakal capres yang diusung. Dalam sosialisasi itu, memberikan keterangan kepada publik peserta pemilu dari partai politiknya. Bukan mengajak memilih calon yang diusung.

“Sekarang masih dalam tahap sosialisasi, ajakan itu tidak diperkenankan. Kemudian memperkenalkan peserta pemilu sudah saatnya dari kemarin,” ujar Bagja.

\* Bersambung hal 7 kol 1

## Analisis Haji Hanya Sekali?

Dr Edy Purwo Saputro



**MENTERI** Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berwacana agar umat muslim hanya menjalankan ibadah haji sekali saja. Tentu ini bukan tanpa alasan. Karena masa tunggu ibadah haji terlalu lama dengan rentang waktu 11-17 tahun dan setiap provinsi berbeda. Meski animo umat muslim di tanah air tetap tinggi untuk bisa masuk dalam daftar tunggu jemaah haji.

\* Bersambung hal 7 kol 1

| JADWAL SALAT          | Zuhur                                         | Asar  | Magrib | Isya  | Subuh |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|                       | 11:43                                         | 15:02 | 17:41  | 18:50 | 04:25 |
| Rabu, 30 Agustus 2023 | Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY |       |        |       |       |

### LAYANAN HOMECARE

Nikmati kemudahan dan kenyamanan layanan kesehatan dari tenaga medis terbaik kami tanpa perlu keluar rumah.

- Perawatan Luka
- Pasang & Lepas Sonde/NGT
- Pasang & Lepas Kateter
- Pasang & Lepas Infus
- Ibu Pasca Bersalin dan Bayi
- Memandikan Pasien

Pendaftaran:  
☎ 0811 2855 872 ☎ 0811 2822 303



KR-Antara/Okky Lukmansyah

**AIR WADUK MENYUSUT:** Sejumlah nelayan menjaring ikan di Waduk Cacaban yang airnya mulai menyusut di Desa Karanganyar, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023). Volume air Waduk Cacaban untuk mengairi sekitar 7.000 hektare persawahan itu sejak lima bulan terakhir menyusut drastis dari normal 50 juta meter kubik menjadi 7,3 juta meter kubik sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan air untuk mengairi areal persawahan di wilayah Pantura.

## Sering Dirugikan Aplikator Pengemudi Ojol Tuntut Payung Hukum

**YOGYA (KR)** - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) mendatangi Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan, Selasa (29/8). Sembari membawa bendera merah putih dan bendera komunitas ojol, mereka tiba di Kantor Gubernur DIY sekitar pukul 11.00 WIB.

Satu persatu dari pengemudi ojol masuk ke Kompleks Kepatihan melalui gerbang selatan secara tertib setelah memarkirkan kendaraannya di sepanjang Jalan Suryatmajan. Selanjutnya, mereka berkumpul di Pendopo Wiyoto Projo untuk menunggu beberapa perwakilan peserta aksi yang sedang menggelar pertemuan dengan pejabat Pemda DIY.

Dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemda DIY. Salah satunya, soal payung hukum di DIY yang dapat melindungi mereka dari keputusan aplikator yang bisa merugikan pengemudi ojol.

“Kedatangan kami untuk meminta payung hukum kepada Gubernur DIY. Karena selama ini terjadi kesenjangan tarif di platform ojol. Bukan kami menuntut menjadi karyawan, tapi (perlindungan) dari keputusan sewenang-wenang pihak aplikator,” kata Koordinator Lapangan Forum Ojol Jogja Bergerak Sapto Paijo saat ditemui se usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemda DIY.

Selain ke kantor Gubernur DIY, sebelumnya para pengemudi ojol juga mendatangi ke Dinas Perhubungan DIY serta Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

Sapto mengatakan, selain soal kejelasan payung hukum, dalam kesempatan itu para pengemudi ojol juga menuntut realisasi Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 tahun 2022 serta KP 1001 tahun 2022.

Regulasi tersebut meng-



KR-Riyana Ekawati

**Tri Saktiyana dan Koordinator Lapangan Forum Ojol Jogja Bergerak Sapto Paijo se usai pertemuan.**

atur biaya jasa minimal per empat kilometer dengan biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi sebesar 15 persen. Sayangnya, belum semua aplikasi menerapkan aturan tersebut, sehingga menimbulkan persaingan yang dianggap tidak sehat antar aplikator. Selain itu, para pengemudi juga tidak pernah diberi kesempatan membela diri

ketika dilaporkan oleh konsumennya.

“Selama ini aplikator langsung memberlakukan skorsing atau *suspend* tanpa adanya langkah klarifikasi dengan pengemudi. Selain itu, tarif antar barang dan makanan yang ditetapkan berbagai layanan transportasi online tidak layak (terlalu rendah),” ungkapnya.

Sapto menjelaskan, setelah dilakukan dialog dengan perwakilan, Pemda DIY berjanji akan melibatkan para driver ojek online untuk merumuskan Peraturan Gubernur (Per-gub) DIY tentang penerapan Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 tahun 2022 serta KP 1001 tahun 2022 di daerah.

\* Bersambung hal 7 kol 5

BIRO TAPEM DIY

## Sosialisasikan Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta

**YOGYA (KR)** - Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY menggelar Sosialisasi Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta dengan tema ‘Optimalisasi Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Keistimewaan DIY’ di Hotel Pandanaran, Prawirothaman, Yogyakarta, Selasa (29/8). Kegiatan berlangsung dua sesi dengan mengundang masyarakat Bron-tokusuman, Mergangsan dan Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Tapem Setda DIY Nur Legawa mengatakan, kegiatan dimaksudkan untuk mendiseminasikan terkait peran masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta.



KR-Atiek Widyastuti H

**Narasumber dalam Sosialisasi Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta yang diselenggarakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.**

“Semua masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam pembangunan,” katanya.

Selama ini ada perbedaan dalam mengakses Dana Keistimewaan di kelurahan

dan kalurahan. Pemerintah Kalurahan bisa mengakses Dana Keistimewaan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten dan

yang disalurkan langsung kepada Pemerintahan Kalurahan. Sedangkan Pemerintahan Kelurahan hanya bisa mengakses Danais melalui mekanisme BKK yang disalurkan melalui Peme-

rintah Kota, karena kelurahan adalah bagian (perangkat) dari kemandirian.

\* Bersambung hal 7 kol 1



● PERTENGAHAN Juni 2023, saya besuk saudara di salah rumah sakit di Yogyakarta. Seorang lansia berjalan tertatih-tatih lewat ruang tunggu, memakai helm. Ketika saya ingatkan, ia menjawab, “Helm ini memang sengaja tidak saya lepas, karena saya stroke, untuk melindungi kepala saya.” (Drs Subagya, Jalan Sri Kaloka 7 Bugisan, Wirobrajan Yogyakarta)-d